

MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI¹

Pamerdi Giri Wiloso²
(FISKOM-UKSW)

Pendahuluan

Istilah *multikulturalisme* begitu populer dan kerap tampil akhir-akhir ini sebagai wacana, baik dalam bentuk pembicaraan lisan maupun naskah tertulis, khususnya di kalangan akademik maupun publik luas yang terkait dengan dunia jurnalisme. Sebetulnya sekitar tiga puluh tahun silam, tepatnya pada tahun 1971, lebih dari sekedar berwacana, Kanada³ merupakan Negara pertama di antara komunitas internasional yang mengangkat dan menerapkan gagasan *multikulturalisme* sebagai kebijakan publik pemerintahan negara tersebut. Dengan melakukan hal itu, Kanada menegaskan dan menegakkan nilai dan harkat martabat warga negaranya, tanpa pandang bulu latar belakang bahasa, asal-muasal kesukuan, kedaerahan, maupun ikatan keagamaan mereka.

Seiring dengan kebijakan multikulturalisme tersebut, dilakukanlah pengakuan tegas atas status hak penduduk pribumi suku Indian dan Eskimo yang telah ber-ratusratus tahun tinggal dan hidup di sana selaku warga negara yang bermula sebagai kelompok minoritas, serta status hak hidup kedua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis, selaku bahasa non-Pribumi, untuk bersama-sama diangkat sebagai bahasa resmi nasional. Sehubungan dengan peristiwa pengakuan oleh negara tersebut, sebagaimana semakin populer di kalangan penelitian antropologi politik dan politik kebudayaan, dapat ditegaskan bahwa fenomena politik kontemporer telah menyaksikan gejala bahwa kelompok minoritas – yang belakangan sering dirujuk dan disebut sebagai komunitas *sub-altern* – semakin antusias mengajukan tuntutan untuk memperoleh pengakuan atas identitasnya.

¹ Disampaikan dalam acara Seminar “MULTIKULTURALISME DAN INTEGRASI BANGSA” yang diselenggarakan oleh KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG pada tgl. 7 Juli 2011 di Kebon Raja, Jl. Soekarno-Hatta Km. 25 Karangjati, Ungaran.

² Dekan FISKOM UKSW untuk periode 2010 – 2014, memperoleh gelar PhD dalam bidang Antropologi dari Universiteit Twente, Nederland pada tahun 2009

³ <http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/multi/inclusive.e.cfm>

Kebijakan *multikulturalisme* yang dilakukan oleh pemerintah Kanada tersebut agaknya dapat dipandang sebagai peristiwa yang sangat fundamental bagi siapapun yang mendambakan terwujudnya cita-cita demokrasi, yang mesthi mempertahankan keyakinan bahwa semua warga negara berkedudukan setara. Sebagaimana dapat diamati dalam fenomena adanya keterjalinan konsep *multikulturalisme* yang diterapkan untuk kehidupan masyarakat yang dikelola berdasarkan prinsip ‘politik pengakuan’ atau *politics of recognition*, di sana, di dalam kehidupan masyarakat multicultural, anggota masyarakat pada umumnya dan anggota kelompok masyarakat pada khususnya dapat menikmati kehidupan sosial-politik mereka dalam suasana kebebasan dan diperlakukan berdasarkan prinsip kesetaraan. Suasana semacam ini berjalan atas dasar sikap negara yang bersandar diri pada prinsip hormat atas segala kenyataan perbedaan, baik perbedaan dalam hal berpikir dan bernalar, maupun perbedaan dalam berkeyakinan politik serta berolah budaya.

Dalam keterkaitannya dengan paham demokrasi, yang hingga kini masih banyak dianut oleh sebagian besar ilmuwan sosial-politik, ditegaskan bahwa di alam demokrasi semua warga negara memiliki kesetaraan dalam hak-hak sipil dan hak-hak politik. Dengan begitu, kehidupan sosial-politik mereka akan ditandai dengan keberadaan sekurang-kurangnya delapan ciri karakteristik penanda kehidupan demokrasi sebagaimana ditegaskan oleh Dahl (1971) dan Tornquist (2002): 1). Hak memilih; 2). Hak dipilih; 3). Hak berkompetisi bagi pemimpin politik untuk memperoleh dukungan massa; 4). Pemilu yang bebas dari segala bentuk tekanan, dan adil; 5). Kebebasan berorganisasi; 6). Kebebasan mengungkapkan pendapat; 7). Sumber informasi alternative; dan 8). Lembaga untuk pembuatan kebijakan public berdasarkan keinginan warga.

Senada dengan paham demokrasi tersebut, kebijakan multikulturalisme memberikan jaminan yang memungkinkan mereka untuk dapat mempertahankan identitasnya, untuk dapat bersikap bangga akan leluhur mereka untuk dapat mempertahankan identitasnya, untuk dapat bersikap membangun rasa *handarbeni* (memiliki, *sense of belonging*), atau rasa memiliki atas kehidupan kelembagaan sosial-politik mereka. Dalam kondisi memperoleh pengakuan semacam ini, diharapkan akan tumbuh rasa aman dan rasa percaya diri, yang pada gilirannya mendorong warga negara untuk mampu bersikap lebih terbuka dan menerima perbedaan budaya. Pengalaman negara Kanada didaku mampu membuahkan hasil positif, dalam pengertian bahwa

penerapan kebijakan multikulturalisme telah mendorong tumbuhnya keserasian hubungan antar kesukuan dan menumbuhkan saling pengertian antar budaya, dan sebaliknya mengerem tumbuhnya rasa penolakan, rasa kebencian, sikap diskriminasi, serta tindak kekerasan dalam interaksi lintas etnisitas serta lintas cultural mereka. Dengan menerapkan kerangka pandang multikulturalisme yang menyediakan ruang kelembagaan bagi tumbuhnya pengakuan atas perbedaan tradisi budaya khas kelompok masyarakat selaku warga Negara, semuanya ini tidak menutup peluang bagi kemungkinan perlunya diskusi kritis yang membahas berbagai kemungkinan munculnya ketegangan antara identitas personal dan identitas kolektif, sebagaimana dibentuk oleh latar belakang agama, gender, kesukuan, ras, dan jenis kelamin. Sebuah pertanyaan lanjutan lantas muncul, yakni bagaimana sebagai buah pelaksanaan politik multikultural, ketegangan itu dapat diatasi mengingat bahwa masyarakat boleh jadi bukan hanya menuntut pengakuan identitas, tetapi juga melakukan tuntutan yang berlanjut pada bentuk separatisme budaya?

Permasalahan

Bhikhu Parekh mengembangkan pemikirannya tentang tinjauan kembali pada topik multikulturalisme dalam perspektif keberagaman budaya dan teori politik. Seluruh pemikirannya merupakan respons teoritik pemikiran Barat yang sangat didominasi oleh pandangan monisme moral yang mencakup pemikiran monisme Yunani, monisme Kristen, monisme liberal klasik, monisme menurut John Locke, monisme menurut J.S. Mill, serta pandangan-pandangan pluralisme yang berkembang dari pemikiran Vico, Montesquieu, dan Herder, beserta pandangan pendukungnya yang mencakup gerakan pemikiran liberal klasik dan liberal kontemporer. Bhikhu Parekh menilai bahwa berbagai macam pandangan dominan tersebut secara filosofis tidak koheren, penuh kontradiksi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etis dalam mengelola keanekaragaman kultural yang dialami dan dirasakan masyarakat modern dalam hal ini masyarakat Barat.

Masyarakat modern atau masyarakat Barat yang Bikhu Parekh amati dan kaji mengklasifikasikan dirinya baik dalam hal kehidupan sosial-budaya maupun sosial-kultural lainnya dengan cara pandang oposisi biner, yaitu pembagian berdasarkan berdasarkan ciri-ciri saling kontras berkebalikan, bahkan bertentangan.

DI SATU SISI	DI SISI LAIN
1.ADA KEBUDAYAAN NASIONAL	1. ADA KELOMPOK KULTURAL YANG BERBEDA
1. ADA KELOMPOK LAMA MAPAN	2.ADA KELOMPOK PENDATANG BARU
2. ADA KELOMPOK PENDIRI REPUBLIK	3.ADA KELOMPOK IMIGRAN
3. ADA AMERIKANISME	4.ADA BUDAYA PINGGIRAN
4. ADA KULIT PUTIH (MAINSTREAM)	5.ADA KULIT HITAM (the BLACK)
5. ADA 'GREAT TRADITION' (KULTUR ADILUHUNG)	6.ADA 'LITTLE TRADITION' (KULTUR 'WONG CILIK)

Pandangan oposisi biner berkembang lanjut kedalam pandangan vertikalisme, yang melihat dua perkara atau hal ihwal ke dalam tataran hirarkis, di mana satu perkara atau suatu hal diletakkan pada peringkat lebih tinggi atau lebih kuat daripada yang lainnya. Pandangan yang bisa disebut sebagai pandangan dualisme kultural vertikal ini membuahkan paradigma ketidaksetaraan, rasisme, arogansi budaya, hegemoni dan dominasi budaya, yang membutuhkan pandangan tentang kesetaraan budaya dan adanya budaya alternative dalam konteks pluralitas budaya.

Bagaimana Mengatasi Persoalan?

Untuk mengatasi persoalan di atas diperlukan gerakan intelektual yang oleh Bhikhu Parekh dikatakan sebagai gerakan *multikulturalisme*, yang olehnya dikatakan sebagai sebuah perspektif tentang kehidupan manusia dimana pihak yang dipandang lemah dapat berjuang untuk pelestarian dan pengakuan budaya berbasis etnisitas mereka. Perjuangan mesthi berlangsung lewat dialog terbuka antar budaya, menumbuhkan norma dan etika interaksi antar budaya, dan penciptaan struktur kelembagaan bagi kesetaraan kebudayaan.

Dialog budaya mewujudkan semangat transendentalisme imanen, yang di dalamnya terjadi dialog budaya yang diharapkan menghasilkan kekuatan sinergi budaya dimana 'kelebihan satu

budaya menutup keterbatasan budaya yang lain. Dalam hal ini hormat pada martabat manusia atau sesama menjadi kunci yang mendasari sikap transcendental tersebut.

Struktur politik masyarakat multikultural perlu dibangun demi penciptaan persatuan dan kebersamaan dengan dukungan kebijakan desentralisasi yang berkeadilan. Pendidikan multikultural perlu dipraktekkan demi menghindari eropasentrisme, yang abai terhadap budaya lain, yang juga sempit dan tidak kritisnya sudut pandang kultural. Narasi sebagai wacana yang dibangun Bhikhu Parekh sangat komprehensif, kritis dan mendalam. Dalam gagasan tentang dialog budaya Bhikhu Parekh, beliau menunjukkan kompetensinya berpikir komprehensif, kritis dan mendalam yang kental dengan nuansa pemikiran ‘open-society’-nya Karl Popper, yang menegaskan bahwa masyarakat di era modern mesthi terbuka untuk membuka dialog demi kelestarian eksistensinya, dan semangat multikulturalismenya tampak adanya pengaruh semangat post-modernisme yang pada prinsipnya menekankan bahwa realitas bersifat plural, dan *power* ada dimana-mana, termasuk *power* yang terkandung dalam beragam realitas budaya. Yang keberadaannya bersifat obyektif memang di era globalisasi, masyarakat mau tak mau, kalau tidak ingin terisolasi, mesthi terbuka bagi alir manusia, alir informasi dan alir moneter, yang melampaui batas-batas politik negara.

Yang perlu dikritisi lebih lanjut oleh Bhikhu Parekh adalah bahwa penelitian-penelitian budaya dunia ketiga sudah begitu banyak dilakukan oleh para ahli antropologi Barat. Analisis mereka bersifat *emik*, dimana kebudayaan dipahami sebagai sistem makna sebagaimana dihayati dalam hidup sehari-hari oleh masyarakat dunia ketiga sebagai subyek yang diteliti. Dalam konteks penelitian tentang demokrasi dan wacana membangun *civil society* di era desentralisasi di Indonesia misalnya, analisis sudah berfokus pada pertanyaan ‘sejauhmana demokrasi dan bertumbuhnya *civil society* bermakna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya?’

Jadi, penelitian tidak lagi semata-mata berkuat pada pengukuran berjalannya demokrasi menurut standard definisi Barat, tetapi berlanjut pada makna demokrasi secara kongkrit bagi kemaslahatan kehidupan sehari-hari anggota masyarakat biasa, bukan warga elit saja. Persoalannya, sejauhmana hasil-hasil penelitian tersebut sudah dimanfaatkan untuk dialog budaya yang produktif dan saling memperkaya pengalaman hidup, sehingga individualisme

Barat yang dirasa mengancam keutuhan atau integrasi sosial masyarakat, mereka bisa belajar dari kolektivisme timur demi perbaikan diri.

Wacana Multikulturalisme dan Wacana Civil Society

Tatkala Bhikhu Parekh membangun pemikiran multikulturalisme sembari mengkaitkannya dengan persoalan kodrat manusia, keanekaragaman kultural, pencarian formasi politik baru, struktur politik masyarakat multikultur, kesetaraan dalam perbedaan, dialog antarbudaya, kebebasan berbicara dan liberalisme serta dinamika kebudayaan dalam konteks globalisasi, maka wacana multikulturalisme bersanding mesra dengan wacana *civil society*.

Gejala maraknya wacana multikulturalisme kiranya dapat disejajarkan dengan maraknya wacana *civil society*, yang menurut pengamatan para pakar antropologi-sosiologi merupakan bagian dari fenomena globalisasi. Dalam kaitannya dengan proses globalisasi, di sini ada satu perkara yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu bahwa sebagai sebuah gejala, proses globalisasi sebagaimana diamati oleh para pakar ilmu-ilmu sosial serempak disertai oleh proses lokalisasi. Oleh karenanya proses yang menampakkan diri berwajah ganda tersebut bisa disebut sebagai proses glokalisasi: globalisasi sekaligus lokalisasi, dimana politik identitas lokal dikonstruksikan secara baru dalam konteks proses transformasi global. Memang, globalisasi tidak senantiasa identik dengan homogenisasi. Dengan demikian politik lokal dengan proses globalisasi saling berinteraksi. Bhikhu Parekh katakan bahwa ‘Sulit untuk menemukan adanya kebudayaan yang selamat tanpa dipengaruhi oleh kebudayaan lain, bahkan yang paling primitif dan terisolasi sekalipun’. Lokalitas dalam dimensi material, sosial serta ideologisnya senantiasa berhasrat untuk mempertahankan, melestarikan, dan memperkembangkan dirinya. Dengan demikian masyarakat adat sekecil apapun menurut skala numerik populasinya, berkeinginan untuk senantiasa mempertahankan kelestarian eksistensinya.

Kesetaraan dan Keadilan antar Budaya

Berbicara tentang kesetaraan dan keadilan antar budaya, Bhikhu Parek mencoba menjernihkan tentang pengertian diskriminasi. Perlakuan yang berbeda terhadap individu-individu atau

kelompok dianggap setara jika mencerminkan cara-cara untuk mewujudkan hak yang sama, kesempatan yang sama, perlakuan yang sama. Penerapan kesetaraan silang budaya memang rentan selalu terhadap tuduhan diskriminasi terhadap kelompok khusus. Beberapa Negara memberikan nilai yang tinggi pada keanekaragaman kultural dan memberi sumber daya dan hak yang lebih kepada kelompok-kelompok minoritas untuk membantu mereka berkembang. Dengan demikian pemaknaan konsep multikulturalisme mesthi terjalin dengan pasangan dikotomik konsep mayoritas – minoritas serta konsep dominan - tidak dominan.

Kesetaraan mencakup tiadanya diskriminasi. Diskriminasi langsung terjadi manakala pihak pengambil diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu, sementara diskriminasi tidak langsung terjadi manakala aturan dan prosedur mengandung bias yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Kesetaraan memerlukan kesetaraan hak dan kewajiban serta pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi serta budaya. Dengan demikian negara mempunyai peran penting dalam membantu perkembangan keadilan dan kebersamaan. Lembaga Negara mesthi bersifat adil dalam memperlakukan anggota komunitas yang berbeda.

Relevansi Pemikiran Antropologi Multikulturalisme untuk Politik Kebudayaan di Indonesia

Secara struktural interaksi antara Negara dan Masyarakat mengkontekskan konsep multikulturalisme. Multikulturalisme memperoleh pemaknaan dalam konteks politik kewargaan. Dalam interaksi antara negara dan masyarakat, negara bisa bertindak sesuai keinginannya dalam rangka melakukan politik pengelolaan atas keanekaragaman budaya masyarakat. Dari sudut pandang keanekaragaman budaya masyarakat, multikulturalisme menjadi relevan sebagai bagian strategi dalam politik kebudayaan. Dengan begini multikulturalisme memperoleh makna dalam konteks interaksi antara negara dan masyarakat dimana negara melakukan politik kewargaan, politik pengelolaan, dan politik kebudayaan, sedangkan masyarakat memberikan reaksinya atas berbagai langkah politik negara tersebut.

Semenjak adanya perubahan politik sebagaimana ditandai oleh lengsernya Presiden Suharto dari kursi kepresidenan yang berlangsung pada bulan Mei 1998, gerakan reformasi total yang

dipelopori mahasiswa yang kemudian memperoleh dukungan public berhasil memaksa Habibie sebagai presiden pengganti Suharto untuk melakukan kebijakan pembentukan masyarakat madani. Seiring dengan melebarnya ruang publik politik, isu-isu politik khususnya juga tentang politik kebudayaan semakin mengemuka dan berkembang cepat. Salah satu isu tersebut adalah isu multikulturalisme, yang diduga dapat menjadi perekat bagi integrasi bangsa. Pluralitas Indonesia mencakup lebih dari 300 kelompok etnis dan beragam kultur keagamaan yang menuntut terbentuknya kerangka politik kebudayaan bagi lestari kesatuan Indonesia.

Semasa Orde Baru, integrasi nasional Indonesia dibangun berdasarkan politik kebudayaan yang menekankan penyeragaman. Seiring dengan perkembangan kondisi dan semangat demokrasi serta reformasi, kebijakan penyeragaman menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan. Sehubungan dengan program desentralisasi, dapat ditegaskan hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab salah satu tuntutan demokratisasi, walau kenyataannya tidak produktif jika dilihat dari kaca mata integrasi nasional suatu bangsa besar. Dalam konteks desentralisasi, otonomi daerah malah seringkali mencuatkan semboyan putra daerah dalam proses kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan sebagai bagian Indonesia, yang notabene merupakan salah satu dari Negara yang paling heterogen dalam hal etnisitas beserta kehidupan keagamaan yang dianutnya, kondisi geografi serta kemampuan ekonomi.

Dengan wilayahnya yang berkepulauan seluas total 1.904.569 kilometer persegi, dan dengan jumlah populasi lebih dari 216 juta orang, Indonesia merupakan primus inter pares, komunitas dan Negara terbesar di Asia Tenggara. Semasa Orde Baru tentunya dapat diingat kembali bahwa pengikat keanekaragaman sosio-kultural Indonesia adalah politik sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan pemerintah yang authoritarian. Pada era reformasi, konsep multikulturalisme menjadi konsep yang relevan untuk membangun Indonesia Baru. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi adalah sebuah masyarakat multikultural Indonesia. Dengan demikian multikulturalisme merupakan acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural yang sebagai ideologi mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajadan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam hal ini multikulturalisme dipakai sebagai kerangka acuan untuk membangun Indonesia sebagai sebuah

bangsa dengan kebudayaan nasional Indonesia, yang bermodalkan kebudayaan-kebudayaan daerah.

Penggunaan istilah multikulturalisme dengan demikian melibatkan perujukan pada pluralitas budaya serta fenomena bagaimana pluralitas budaya ini direspons. Dengan demikian pada dasarnya multikulturalisme merupakan cara pandang kehidupan manusia yang relevan diterapkan dimanapun tempat, mengingat kenyataan bahwa hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan, dimana perbedaan lintas menjadi azas. Terlebih mengingat fenomena kebudayaan di era globalisasi, dimana arus gerakan manusia, barang-barang dan konsumsi dan informasi mengalir begitu deras, dan bergerak sebebaskan dalam skala dunia, sambil menembus batas-batas geografis negara dan bangsa, yang menjadikan batas-batas entitas kemasyarakatan yang tadinya serba tetap dan pasti, menjadi cair, bahkan lenyap hilang sepenuhnya. Dalam konteks pengaruh proses globalisasi, multikulturalisme mesthi diterjemahkan sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara. Sebagai model kebijakan, multikulturalisme perlu dikembangkan bagi kepentingan integrasi nasional Indonesia.

Model pertama mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas merupakan sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan bahasa. Dalam hal ini nasionalitas dimaksudkan sebagai sarana perekat integrasi bangsa. Setiap orang berhak dilindungi karena peranannya sebagai warga Negara. Bisa dibayangkan dalam model pertama ini segala perkara yang berkaitan dengan masalah latar belakang tradisional seperti kesukuan, keagamaan dan kebahasaan, semuanya akan dimasukkan dalam ranah urusan privat. Sedangkan urusan public terkait hanya sebatas perkara yang berkaitan dengan predikat kenasionalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana nasib kebudayaan etnik yang mendasari pembentukan Negara? Kemana arah kekuasaan integrasi nasional yang digenggam oleh tangan segelintir oligarkhi menuju?

Model kedua berlawanan dengan model pertama merupakan model nasionalitas etnik yang mendasarkan diri pada kesadaran kuat akan etnisitas yang merupakan pendiri bangsa. Model ini dapat dibayangkan sebagai model tertutup, dimana orang luar yang tidak bersangkutan-paut

berhubungan darah dengan etnik pendiri bangsa akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing.

Model ketiga merupakan model multikultural etnik, yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini keanekaragaman merupakan realitas yang harus diakui dan diakomodasi Negara, demikian pula identitas dan asal-usul warga Negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena kebijakan model ketiga ini tidak hanya isu keragaman kebudayaan, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, isu dominan-tidak dominan, yang menimbulkan kompleksitas persoalan karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan di bidang ekonomi. Jika kekuasaan Negara lemah, konflik internal berkepanjangan akan semakin melemahkan Negara itu sendiri.

Multikulturalisme sebagai stimulant menantang bagi ilmuwan sosial Indonesia mendorong pemikir kritis mengenai model kebijakan pengelolaan keanekaragaman budaya yang relevan dengan konteks keIndonesiaan. Berdasarkan model pemikiran model kebijakan yang tepat, hal tersebut mendukung proses demokratisasi yang sedang dalam tahap 'proses menjadi' di Indonesia tercinta ini.

Kepustakaan

- Astuti, B.W., 2009, *Orasi Budaya Garin Nugroho: Eksistensi Seni Budaya di Era Global*, makalah untuk perkuliahan ISBD Semester Pengayaan 2008-2009
- Bachtiar, HW, et.al. 1987, *Budaya dan Manusia Indonesia*, Yogyakarta: Hanindita
- Bresnan, J., (ed.), 2005, *Indonesia: The Great Transition*, Lanham: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Budiman, H., 2005, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: Interseksi Foundation
- Geertz, C., 2000, *Local Knowledge*, New York: Basic Books
- Geertz, H., 1981, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS-UI
- Gutmann, A., 1994, *Multiculturalism*, New Jersey: Princeton University Press
- Kleden, I., 'Soedjatmoko: Sebuah Psikologi Pembebasan', dalam Soedjatmoko, 1984, *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES
- Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press
- Kuntowijoyo, 1987, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Levi-Strauss, C., 1967, *Structural Anthropology*, New York: Anchor Books
- Nasikun, 1993, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Parekh, B., 2008, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Pasti, FA, 'Dayak Islam di Kalimantan Barat', dalam B. Susanto (ed.), 2003, *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Poespowardoyo, S., 1989, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia
- Popper, K., 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Redfield, R., 1953, *The Primitive World and Its Transformation*, Ithaca: Cornell University Press
- Redfield, R., 1955, *The Little Community: Viewpoints for the Study of Human Whole*, Chicago: University of Chicago Press
- Redfield, R., 1963, *The Little Community, Peasant Society, and Culture*, Chicago: University of Chicago Press
- Ritzer, G., 2003, *Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Juxtapose dan Kreasi Wacana
- Saifuddin, AF, 2006, *Antropologi Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Setiono, B., 'Campursari: Nyanyian Hibrida dari Jawa Postkolonial', dalam B. Susanto (ed.), 2003, *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Soedjatmoko, 1984, *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES
- Soekiman, D., 2000, *Kebudayaan Indis*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

=0=